



APBN Dihemat, Usaha Hotel Turun Drastis

ASOSIASI Pariwisata Nasional (Asparnas) meminta pemerintah memberikan solusi terhadap industri perhotelan yang saat ini mulai terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Ketua Umum Asparnas Ngadiman Sudiaman mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden membuat operasional hotel menurun.

"Dari Januari hingga Februari ini, penurunan omzet mencapai rata-rata 30% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Bulan Maret, saat masuk bulan puasa, biasanya lebih sepi lagi," katanya dalam keterangannya, kemarin.

Ia belum menghitung secara pasti besaran potensi kehilangan pendapatan secara keseluruhan. Namun sejumlah hotel dan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata mulai melakukan efisiensi dengan pengurangan karyawan secara bertahap.

Ngadiman menambahkan, pada 2024, rata-rata okupansi turun hampir mencapai 20% ketimbang 2023 sehingga dirasakan memukul pengusaha hotel, hiburan, serta restoran. Bahkan di beberapa daerah banyak usaha sudah tutup. Dia mencontohkan pada Desember 2024, hotel-hotel di Bali yang biasanya ramai pengunjung, tingkat hunian turun 30% bahkan hingga 50%.

"Ini menandakan daya beli rendah dari masyarakat dan turis global yang juga menurun datang ke Indonesia," katanya.

Diakukannya, pemotongan anggaran pemerintah ber-

dampak jangka panjang dan luas, bukan hanya di sektor restoran maupun perhotelan. Karena itu, pihaknya menyangkan langkah pemerintah yang mengeluarkan aturan itu tanpa melihat dampaknya di sejumlah sektor, bukan hanya perhotelan.

Kebijakan efisiensi anggaran, sambungnya, juga membuat setoran pajak pengusaha di berbagai sektor berkurang.

"Karena pengurangan anggaran untuk *meeting* dan perjalanan dinas tentu akan mengurangi omzet pengusaha hotel, penerbangan, restoran, dan UMKM lainnya. Setoran pajak pastinya juga akan turun," tambahnya.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Efisiensi anggaran tetap diberlakukan, namun hanya ditujukan untuk perjalanan dinas ke luar negeri.

Di kesempatan berbeda, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta Deddy Pranowo Eryono menyebut pengusaha hotel di wilayah itu mulai memangkas jam kerja karyawannya. Tujuannya untuk menekan biaya operasi.

"Sudah ada 3 hingga 5 hotel yang melakukan efisiensi di sektor SDM, terutama yang menangani MICE (*Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions*)," ujar dia, kemarin.

Di Yogyakarta, setelah efisiensi anggaran diumumkan pemerintah, nilai pembatalan pesanan di sektor MICE mencapai Rp1 miliar. (AT/Ant/E-1)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005